

Determinasi Indeks Pendidikan dan Strategi Peningkatannya di Provinsi Jambi

Mohammad Ikhwan Afdloli*; Heriberta; Erni Achmad

Prodi Magister Ilmu Ekonomi, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

**E-mail korespondensi: ikhwanafdloli@gmail.com*

Abstract

This research analyzes: (1) the development of per capita income, School Participation Rate, poverty, Special Allocation Fund, government expenditure, and the education index in Jambi Province (2002–2022), (2) their influence on the education index, and (3) strategies to enhance the index through the Special Allocation Fund. Using quantitative descriptive methods, data from the Central Statistics Agency, Department of Education, and Regional Development Planning Agency were analyzed. Results show fluctuating trends in key variables and confirm that per capita income, School Participation Rate, Special Allocation Fund, and government expenditure significantly impact the education index. A Strengths-Opportunities strategy is recommended, focusing on: (1) expanding educational access in rural areas, (2) balancing teacher and staff distribution, (3) improving facility audits, (4) enhancing learning processes with better facilities and staff training, (5) fostering community collaboration for conducive environments, and (6) optimizing facility use to improve student outcomes and graduate quality. To improve the education index, local governments should strengthen Dapodik operator capacity through training and enhance coordination between the Department of Education and schools for accurate reporting and facility planning.

Keyword: *strategy, education index, determinants*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis: (1) perkembangan pendapatan per kapita, Angka Partisipasi Sekolah, kemiskinan, Dana Alokasi Khusus, belanja pemerintah, dan indeks pendidikan di Provinsi Jambi (2002–2022), (2) pengaruhnya terhadap indeks pendidikan, dan (3) strategi peningkatan indeks melalui Dana Alokasi Khusus. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, data dari Badan Pusat Statistik, Departemen Pendidikan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan tren fluktuasi pada variabel-variabel kunci dan menegaskan bahwa pendapatan per kapita, Angka Partisipasi Sekolah, Dana Alokasi Khusus, dan belanja pemerintah berdampak signifikan terhadap indeks pendidikan. Strategi Kekuatan-Peluang direkomendasikan, dengan fokus pada: (1) perluasan akses pendidikan di daerah pedesaan, (2) penyeimbangan distribusi guru dan staf, (3) peningkatan audit fasilitas, (4) peningkatan proses pembelajaran dengan fasilitas dan pelatihan staf yang lebih baik, (5) pembinaan kolaborasi masyarakat untuk lingkungan yang kondusif, dan (6) optimalisasi penggunaan fasilitas untuk meningkatkan hasil siswa dan kualitas lulusan. Untuk meningkatkan indeks pendidikan, pemerintah daerah harus memperkuat kapasitas operator Dapodik melalui pelatihan dan meningkatkan koordinasi antara Departemen Pendidikan dan sekolah untuk pelaporan yang akurat dan perencanaan fasilitas.

Kata kunci: *strategi, indeks pendidikan, determinansi*

PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu bidang garapan dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga menjadi modal dasar dalam pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan bangsa. Hal ini dikarenakan pendidikan pada hakekatnya merupakan bentuk yang paling esensial dalam kehidupan manusia, dan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan alokasi belanja pada sektor pendidikan yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan serta melakukan investasi dalam membentuk modal manusia (*human capital*). Hal ini merupakan komponen penting dalam rangka mendukung program pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dengan skema *benefit spillover*. Besarnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan akan menentukan seberapa besar pencapaian hasil pembangunannya (Mongan, 2019).

Indeks Pendidikan merupakan salah satu dari tiga komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pendidikan digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia. Berdasarkan *education index* yang dikeluarkan oleh *Human Development Reports*, pada 2017, Indonesia ada di posisi ketujuh di ASEAN dengan skor 0,622. Skor tertinggi diraih Singapura, yaitu sebesar 0,832. Peringkat kedua ditempati oleh Malaysia (0,719) dan disusul oleh Brunei Darussalam (0,704). Pada posisi keempat ada Thailand dan Filipina, keduanya sama-sama memiliki skor 0,661. Angka tersebut dihitung berdasarkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Data statistik pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019. Pada tahun 2015 rata-rata lama sekolah adalah 8,32 tahun. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 8,42 tahun. Pada tahun 2017, angka rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan kembali menjadi 8,5 tahun. Pada 2018, rata-rata lama sekolah di Indonesia mencapai 8,58 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP sederajat. Pada tahun 2019, angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,75 tahun dan sudah memenuhi target dari Renstra Kemendikbud sebesar 8,7 tahun. Namun angka tersebut belum dapat memenuhi target RPJMN pada tahun 2019 dimana rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas ditargetkan sebesar 8,8 tahun. Selain itu, antara wilayah desa dan kota pun juga ada ketimpangan. Capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Penduduk perkotaan rata-rata telah menyelesaikan pendidikan dasar 9 tahun, sementara penduduk perdesaan rata-rata hanya bersekolah sampai kelas 7 SMP sederajat (kurang lebih 7 tahun).

Pada skala lingkup yang lebih kecil, data statistik pendidikan Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 hingga 2019, indeks pendidikan Provinsi Jambi cenderung statis atau dengan kata lain tidak mengalami penurunan maupun peningkatan. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS, peringkat indeks pendidikan Provinsi Jambi sepanjang tahun 2014-2018 berada di peringkat ke-19 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, dengan rata-rata nilai indeks pendidikan per-tahun sebesar 62,13.

Data pada Tabel 1. juga menunjukkan angka harapan lama sekolah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,09 per-tahun. Sementara untuk Indeks Harapan Lama Sekolah (IHLS) peningkatan indeks terjadi pada tahun 2016 dan tahun 2018, yaitu hanya sebesar 0,01. Untuk angka rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dengan rata-rata peningkatan

sebesar 0,12 per-tahun. Begitupula dengan Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (IRLS) juga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,01. Selain itu, dari data statistik pendidikan Provinsi Jambi diketahui pula bahwa persentase terbesar ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk Provinsi Jambi adalah SD/MI (26,06 persen) dan SMA/MA/SMK/Paket C (26,65 persen). Dari data ini dapat dikatakan bahwa taraf pendidikan penduduk Provinsi Jambi masih tergolong rendah. Dengan demikian pembangunan pendidikan selama periode 2015-2019 di Provinsi Jambi belum sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 1. Indeks Pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah, dan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019

Indikator	Tahun					Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,57	12,72	12,85	12,90	12,93	12,79
Indeks Harapan Lama Sekolah (IHLS)	0,70	0,71	0,71	0,72	0,72	0,71
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,96	8,07	8,15	8,23	8,45	8,17
Indeks Rata-rata Lama Sekolah (IRLS)	0,53	0,54	0,54	0,55	0,56	0,54
Indeks Pendidikan (IHLS – IRLS/2)	0,43	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Pemberian transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan indeks pendidikan. Nashshar dan Mulyana (2022) menyatakan bahwa DAK fisik pendidikan berkontribusi dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia, khususnya di bidang Pendidikan. Pembangunan sarana dan prasarana serta infrasturktur Pendidikan yang memadai yang dibiayai oleh DAK fisik pendidikan dapat meningkatkan standar pelayanan minimal pendidikan serta akses pendidikan yang lebih luas khususnya bagi masyarakat usia sekolah di tingkat daerah kabupaten. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Mahendra dkk (2016), dimana ketika DAK fisik Pendidikan digunakan untuk membiayai pembangunan gedung sekolah baru atau memperbaiki gedung serta fasilitas pendukung sekolah lainnya yang terletak lebih dekat dengan lingkungan masyarakat atau lebih mudah dijangkau, hal ini dapat mendorong lebih banyak siswa di daerah tersebut untuk bersekolah. Hasil penelitian Maysaroh dan Arif (2022), Amir dkk (2019), dan Sembiring (2020) membuktikan bahwa DAK fisik pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia bidang pendidikan.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menunjukkan rata-rata DAK fisik bidang pendidikan yang diterima Provinsi Jambi setiap tahunnya adalah sebesar 278,48 miliar rupiah per-tahun. Namun, bila merujuk pada data indeks pendidikan di Provinsi Jambi, mengindikasikan bahwa jumlah DAK fisik pendidikan yang diterima Provinsi Jambi setiap tahunnya, ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan indeks pendidikan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pengalokasian dan pengelolaan DAK fisik pendidikan sudah dilakukan dengan tepat dalam peningkatan indeks pendidikan.

Tinggi rendahnya indeks pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, selain dari DAK fisik bidang pendidikan. Hasil penelitian Baidowi dkk (2022), Sasana (2012), dan Suparyati (2014) membuktikan bahwa pendapatan per-kapita berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia bidang pendidikan. Sementara hasil penelitian Aprilia dan Cerya (2023), Novitasari dan Wenagama (2018), Dahlan (2018), dan

Rosyadah (2021) membuktikan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia bidang pendidikan.

Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan diduga juga dapat berpengaruh terhadap indeks Pendidikan. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah yang memadai di bidang pendidikan dapat membantu meningkatkan akses pendidikan. Dana tersebut dapat digunakan untuk membangun lebih banyak sekolah, khususnya di daerah terpencil, serta menyediakan transportasi atau bantuan keuangan kepada siswa yang kesulitan akses ke sekolah. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang memadai juga dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan pendidikan. Dengan menyediakan akses dan kualitas pendidikan yang setara bagi semua anak berusia sekolah, termasuk mereka yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah, pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan indeks pendidikan di suatu daerah seiring dengan peningkatan akses pendidikan dan partisipasi anak dalam bersekolah. Hasil penelitian Larassita dkk (2015), Mongan (2019), Kahang dkk (2016), serta Wahyuni dan Amar (2023) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia bidang pendidikan.

Faktor berikutnya yang diduga dapat berpengaruh terhadap indeks Pendidikan adalah kemiskinan. Karini (2018) menyatakan bahwa masalah ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi anak untuk bersekolah dan tingginya angka putus sekolah pada kelompok masyarakat miskin. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah (miskin) tidak memiliki dana yang cukup untuk mengirim anak-anak ke sekolah, karena pendidikan memang membutuhkan biaya yang relatif besar. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah, akan mengalami kesulitan mengeluarkan biaya yang dibutuhkan proses pembelajaran. Seiring dengan hal tersebut, banyak masyarakat miskin yang lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan Indonesia saat ini khususnya dalam pemerataan pendidikan di setiap daerah. Hasil penelitian Hidayati dan Imaningsih (2022), Karini (2018), serta Rahmatin dan Soejoto (2017) membuktikan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan manusia di bidang pendidikan.

Berdasarkan pemaparan permasalahan tentang pengalokasian dan pengelolaan DAK, serta permasalahan indeks pendidikan di Provinsi Jambi, maka perlu dilakukan kajian untuk menganalisis sejauh mana pengaruh pendapatan per-kapita, Angka Partisipasi Sekolah (APS), jumlah penduduk berusia sekolah, DAK fisik Pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pendidikan di Provinsi Jambi, serta mencari strategi pengalokasian DAK Pendidikan yang tepat dan dapat diterapkan untuk meningkatkan indeks pendidikan di Provinsi Jambi.

METODE

Metode penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan perkembangan pendapatan per-kapita, Angka Partisipasi Sekolah (APS), kemiskinan, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan indeks pendidikan di Provinsi Jambi selama periode 2002-2022, serta strategi Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan indeks pendidikan. Sedangkan metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis pengaruh pendapatan per-

kapita, Angka Partisipasi Sekolah (APS), kemiskinan, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pendidikan Provinsi Jambi.

Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil dalam penelitian ini yaitu strategi peningkatan indeks pendidikan Provinsi Jambi. Data primer tersebut didapatkan melalui kuesioner SWOT yang dibagikan kepada 40 orang responden. Data sekunder dalam penelitian ini bersifat *time series* dalam kurun waktu 2002-2022, meliputi; (1) pendapatan per-kapita tahun 2002-2022, (2) angka partisipasi Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun 2002-2022, (3) kemiskinan tahun 2002-2022, (4) DAK fisik bidang pendidikan tahun 2002-2022, (5) pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tahun 2002-2022, (6) Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2002-2022, (7) angka melek huruf tahun 2002-2022, (8) Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2002-2022, dan (9) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2002-2022. Data sekunder ini didapatkan melalui dokumentasi dari laporan yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jambi.

Analisis data

Untuk menganalisis pendapatan per-kapita, Angka Partisipasi Sekolah (APS), kemiskinan, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan indeks pendidikan di Provinsi Jambi selama periode periode 2002-2022, digunakan teknik statistik deskriptif. Sementara untuk menganalisis pengaruh pendapatan per-kapita, Angka Partisipasi Sekolah (APS), jumlah penduduk berusia sekolah, DAK fisik Pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap indeks pendidikan, digunakan teknik analisa kuantitatif dengan menggunakan alat analisis berupa regresi linier berganda. Terkait dengan strategi Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan indeks pendidikan, digunakan teknik analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis perkembangan pendapatan per-kapita Provinsi Jambi Periode 2002-2022

Perkembangan pendapatan per-kapita Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2002-2022, menunjukkan rata-rata pendapatan per-kapita pertahun di Provinsi Jambi sebesar Rp 26.675.909. Dari data tersebut diketahui bahwa pendapatan per-kapita tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp 44.536.642, sedangkan pendapatan per-kapita terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp 5.622.388. Dilihat dari perkembangannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkembangan pendapatan per-kapita di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, dengan nilai rata-rata perkembangan pendapatan per-kapita sebesar 12,42 persen per-tahun. Itu artinya peningkatan pendapatan per-kapita lebih dominan dibandingkan penurunan pendapatan per-kapita selama periode 2002-2022. Peningkatan pendapatan per-kapita tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 88,22 persen, sedangkan penurunan pendapatan per-kapita tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar -3,53 persen.

Tinggi rendahnya pendapatan per-kapita di suatu daerah atau negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya nilai tambah pertanian. Nilai tambah pertanian yang semakin besar dapat berperan bagi peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, yang berarti nilai tambah pertanian memiliki hubungan yang positif terhadap pendapatan per-kapita (Malale dkk, 2014). Faktor berikutnya yang dapat

berpengaruh terhadap pendapatan per-kapita adalah rasio investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Hasil penelitian Aviliani dkk (2014) menunjukkan bahwa rasio investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap produk domestik bruto dan pendapatan per-kapita tahun sebelumnya mempengaruhi besarnya pendapatan per-kapita saat ini.

Inflasi juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan per-kapita. Inflasi merupakan keadaan dimana harga-harga barang dalam sebuah perekonomian mengalami kenaikan secara umum dan terus menerus. Inflasi terjadi karena jumlah uang beredar di masyarakat berlebih, sehingga menyebabkan nilai mata uang tersebut menjadi turun. Dengan adanya kenaikan harga (inflasi) maka konsumsi masyarakat dan kegiatan investasi akan mengalami penurunan. Hal ini tentu akan berdampak pada penurunan produk domestik bruto suatu negara dan PDRB daerah, karena konsumsi dan investasi berkurang, sehingga hal ini juga akan berdampak pada penurunan pendapatan per kapita (Lubis, 2014).

Analisis perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) Provinsi Jambi

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Jambi selama periode 2002-2022 menunjukkan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk jenjang pendidikan SMA di Provinsi Jambi selama periode 2002 hingga 2022 adalah 62,77 persen per-tahun, yang berarti terdapat 62,77 persen penduduk yang mengenyam jenjang pendidikan SMA dari total penduduk yang berusia untuk jenjang pendidikan yang sama (16-18 tahun). Dari data tersebut diketahui bahwa APS tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 72,53 persen, sedangkan APS terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 51,47 persen. Dilihat dari perkembangannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkembangan APS di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, dengan nilai rata-rata perkembangan APS sebesar 1,05 persen per-tahun. Nilai rata-rata perkembangan yang positif tersebut, menerangkan bahwa peningkatan APS lebih dominan dibandingkan penurunan APS selama periode 2002-2022. Peningkatan APS tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 6,44, sedangkan penurunan APS tertinggi terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar -2,15 persen.

Tinggi rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya faktor ekonomi. Karini (2018) menyatakan bahwa masalah ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi sekolah (APS) dan tingginya angka putus sekolah pada kelompok masyarakat miskin. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi rendah tidak memiliki dana yang cukup untuk mengirim anak-anak ke sekolah, karena pendidikan memang membutuhkan biaya yang relatif besar. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang rendah, akan mengalami kesulitan mengeluarkan biaya yang dibutuhkan proses pembelajaran. Seiring dengan hal tersebut, banyak masyarakat miskin yang lebih memilih untuk bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Hasil penelitian Virdam dan Ariani (2023) membuktikan bahwa PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, dan jumlah sekolah berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS). Sementara hasil penelitian Berlian (2011) menunjukkan faktor-faktor yang terkait dengan rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) meliputi; (1) kemiskinan penduduk, (2) kesulitan menuju sekolah (faktor geografi yang kurang menguntungkan), (3) kurangnya layanan pendidikan, (4) rendahnya motivasi orang tua dan siswa terhadap pendidikan, (5) kurangnya dukungan pemerintah daerah dan

masyarakat terhadap pendidikan, dan (6) faktor sosial budaya yang kurang mendukung terhadap pendidikan.

Analisis perkembangan kemiskinan di Provinsi Jambi Periode 2002-2022

Perkembangan kemiskinan di Provinsi Jambi selama periode 2002-2022 menunjukkan rata-rata jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi selama periode 2002 hingga 2022 adalah 41.065 orang per-tahun. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebanyak 55.510 orang, sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebanyak 20.400 orang. Dilihat dari perkembangannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, dengan nilai rata-rata perkembangan jumlah penduduk miskin sebesar 7,16 persen per-tahun. Nilai rata-rata perkembangan yang positif tersebut, menerangkan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin lebih dominan dibandingkan penurunan jumlah penduduk miskin selama periode 2002-2022. Peningkatan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 136,64 persen, sedangkan penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar -8,46 persen.

Larasati dkk (2021) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Hasil penelitian Priseptian dan Primandhana (2022) membuktikan bahwa upah minimum berpengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah UMP maka kemiskinan di suatu daerah, maka semakin rendah kemiskinan atau mengalami penurunan. Sebaliknya, jika jumlah UMP rendah maka kemiskinan mengalami peningkatan. Sementara hasil penelitian Aziz dkk (2016) membuktikan bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya bahwa jika pendidikan masyarakat meningkat akan mengurangi angka kemiskinan. Fakta bahwa tingkat pendidikan sangat dibutuhkan dalam mencari pekerjaan yang layak tidak bisa dipungkiri. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat terutama di daerah pedalaman yang masih terasing menyebabkan masyarakatnya masih sulit untuk lepas dari kemiskinan.

Analisis perkembangan DAK Fisik Pendidikan Provinsi Jambi Periode 2002-2022

Perkembangan DAK fisik pendidikan Provinsi Jambi selama periode 2002 hingga 2022 menunjukkan bahwa rata-rata DAK fisik pendidikan yang diterima pertahun di Provinsi Jambi sebesar Rp 33.369.851.343. Dari data tersebut diketahui bahwa DAK fisik pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp 67.019.800.000, sedangkan DAK fisik pendidikan terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp 13.997.800.000. Dilihat dari perkembangannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkembangan DAK fisik pendidikan yang diterima Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, dengan nilai rata-rata perkembangan DAK fisik pendidikan sebesar 19,94 persen per-tahun. Itu artinya peningkatan DAK fisik pendidikan lebih dominan dibandingkan penurunan DAK fisik pendidikan selama periode 2002-2022. Peningkatan DAK fisik pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 267,73 persen, sedangkan penurunan DAK fisik pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar -53,04 persen.

Kaharuddin (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan DAK bidang pendidikan yaitu; faktor regulasi, faktor pelaksanaan anggaran, faktor kapasitas sumber daya manusia, faktor penganggaran

daerah, dan faktor pengawasan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa faktor regulasi berupa; (1) peraturan yang sering mengalami perubahan, (2) petunjuk teknis yang terlambat dan permasalahan sosialisasi petunjuk teknis, serta (3) ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan DAK menghambat penyerapan Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan. Terkait faktor pelaksanaan anggaran berupa; (1) penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang cukup lama, (2) revisi DPA-SKPD yang berulang-ulang, kurangnya koordinasi antar SKPD terkait, (3) proses penyaluran DAK yang rumit, serta (4) lamanya proses pengadaan barang/jasa menghambat penyerapan DAK bidang pendidikan. Untuk faktor kapasitas sumber daya manusia berupa; (1) kurangnya pemahaman, (2) kurangnya bimbingan teknis/pelatihan, (3) kurangnya jumlah SDM, dan (4) belum adanya penghargaan dan sanksi yang tegas menghambat penyerapan belanja dana alokasi khusus bidang pendidikan. Faktor penganggaran daerah berupa; (1) terlambatnya penetapan Peraturan Daerah (Perda) APBD, dan (2) tumpang tindih anggaran menghambat penyerapan belanja dana alokasi khusus bidang pendidikan. Sementara faktor pengawasan berupa; (1) partisipasi masyarakat yang masih kurang, dan (2) lemahnya pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah juga menghambat penyerapan belanja dana alokasi khusus bidang pendidikan.

Analisis perkembangan pengeluaran pemerintah provinsi jambi bidang pendidikan

Perkembangan pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi bidang pendidikan selama periode 2002 hingga 2022, menunjukkan rata-rata pengeluaran bidang pendidikan sebesar Rp 173.285.190.476 per-tahun. Dari data tersebut diketahui bahwa pengeluaran bidang pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 299.368.000.000, sedangkan pengeluaran bidang pendidikan terendah terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp 10.329.000.000. Dilihat dari perkembangannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkembangan pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi bidang pendidikan mengalami fluktuasi, dengan nilai rata-rata perkembangan pengeluaran bidang pendidikan sebesar 24,26 persen per-tahun. Itu artinya peningkatan pengeluaran bidang pendidikan lebih dominan dibandingkan penurunan pengeluaran bidang pendidikan selama periode 2002-2022. Peningkatan pengeluaran bidang pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2006 yaitu sebesar 137,20 persen, sedangkan penurunan pengeluaran bidang pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar -28,04 persen.

Analisis perkembangan indeks pendidikan Provinsi Jambi Periode 2002-2022

Perkembangan indeks pendidikan Provinsi Jambi selama periode 2002 hingga 2022, menunjukkan rata-rata indeks pendidikan Provinsi Jambi selama periode 2002 hingga 2022 adalah 0,51 per-tahun. Dari data tersebut diketahui bahwa indeks pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,62, sedangkan indeks pendidikan terendah terjadi pada tahun 2002 dan 2005, dengan nilai masing-masing indeks sebesar 0,40. Dilihat dari perkembangannya menunjukkan bahwa secara keseluruhan perkembangan indeks pendidikan di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, dengan nilai rata-rata perkembangan indeks pendidikan sebesar 2,09 persen per-tahun. Nilai rata-rata perkembangan yang positif tersebut, menerangkan bahwa peningkatan indeks pendidikan lebih dominan dibandingkan penurunan indeks pendidikan selama periode 2002-2022. Peningkatan indeks pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 13,60, sedangkan penurunan APS tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar -6,81 persen.

Uji koefisien regresi

Berdasarkan hasil perhitungan nilai koefisien dari β_0 , β_1 , β_2 , β_3 , β_4 , dan β_5 dengan menggunakan analisis regresi berganda pada program SPSS 21, maka didapatkan model persamaan regresi berganda, yaitu $Y = 1,066 + 0,323X_1 + 0,874X_2 - 0,200X_3 + 0,770X_4 + 0,446X_5$. Dari model persamaan regresi tersebut, berarti indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y) akan mengalami kenaikan, bila pendapatan per-kapita (X_1), Angka Partisipasi Sekolah (APS) (X_2), DAK fisik pendidikan (X_4), dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_5) ditingkatkan. Namun, indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y) akan mengalami penurunan, jika kemiskinan (X_3) mengalami peningkatan. Dari hasil perhitungan koefisien regresi masing-masing variabel, maka didapatkan gambaran hubungan antar variabel menurut model persamaan regresi sebagai berikut:

Konstanta (a) = 1,066, artinya jika variabel pendapatan per-kapita (X_1), Angka Partisipasi Sekolah (APS) (X_2), kemiskinan (X_3), DAK fisik pendidikan (X_4), dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_5) tidak ada, maka nilai indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y) sebesar 1,066.

Koefisien regresi X_1 (β_1X_1) = 0,323, artinya jika terjadi peningkatan pendapatan per-kapita (X_1) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y) sebesar 0,323 persen. Koefisien regresi X_2 (β_2X_2) = 0,874, artinya jika terjadi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) (X_2) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y) sebesar 0,874 persen.

Koefisien regresi X_3 (β_3X_3) = -0,200, artinya jika terjadi peningkatan kemiskinan (X_3) sebesar 1 persen, maka akan menurunkan indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y) sebesar 0,200 persen. Koefisien regresi X_4 (β_4X_4) = 0,770, artinya jika terjadi peningkatan DAK fisik pendidikan (X_4) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y) sebesar 0,770 persen.

Koefisien regresi X_5 (β_5X_5) = 0,446, artinya jika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X_5) sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y) sebesar 0,446 persen.

Uji koefisien determinasi (R^2)

Hasil perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) melalui program SPSS 21 didapatkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,763. Hal ini berarti variasi naik turunnya variabel indeks pendidikan Provinsi Jambi mampu dijelaskan oleh variabel pendapatan per-kapita, Angka Partisipasi Sekolah (APS), kemiskinan, DAK fisik pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar 76,3 persen, sementara sisanya sebesar 13,7 persen diterangkan oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji asumsi klasik

Untuk mengetahui apakah model persamaan regresi berganda, yaitu $Y = 1,066 + 0,323X_1 + 0,874X_2 - 0,200X_3 + 0,770X_4 + 0,446X_5$ dapat dinyatakan sebagai model yang baik, maka model tersebut harus memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Kriteria tersebut dapat dicapai bila model telah memenuhi uji asumsi klasik yang meliputi; uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji normalitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pada pengujian normalitas data, peneliti

menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan berbantuan program analisis statistik SPSS 21. Adapun pedoman dalam menentukan apakah data berdistribusi secara normal pada uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah dengan melihat apakah nilai sig (signifikansi atau nilai probabilitas) lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji *Kolmogorov-Smirnov*, didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,922, dimana $0,922 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini diambil dari populasi yang berdistribusi normal.

Uji autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi pada model regresi linier yang didapatkan. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara variabel penjelas. Berdasarkan uji Run Test yang telah didapatkan dengan berbantuan program analisis statistik SPSS 21, didapat nilai probabilitas (sig) sebesar 0,364, dimana nilai ini $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami gejala autokorelasi.

Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Pedoman dalam mendapatkan keputusan ada tidaknya gejala multikolinieritas yaitu dengan menghitung nilai VIF dari setiap variabel independen. Bila nilai VIF lebih besar dari 10 maka model regresi linier tersebut memiliki gejala multikolinieritas, sedangkan bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka model regresi linier tersebut tidak memiliki gejala multikolinieritas.

Tabel 2. Hasil uji multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	1,066	0,501			
1 X1	0,323	0,100	0,394	0,797	1,255
X2	0,874	0,258	0,981	0,141	7,093
X3	-0,200	0,314	-0,172	0,163	6,145
X4	0,770	0,232	0,430	0,703	1,423
X5	0,446	0,140	0,434	0,636	1,573

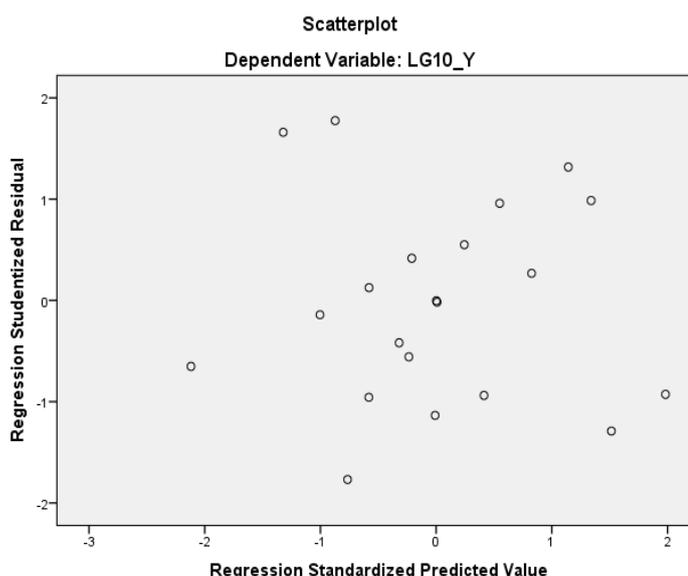
Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) menggunakan program analisis statistik SPSS 21, diperoleh nilai VIF untuk setiap variabel independen sebagai berikut: variabel pendapatan per-kapita (X1) memiliki nilai VIF sebesar 1,255; variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) (X2) memiliki nilai VIF sebesar 7,093; variabel kemiskinan (X3) memiliki nilai VIF sebesar 6,145; variabel DAK fisik pendidikan (X4) memiliki nilai VIF sebesar 1,423; dan variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki nilai VIF sebesar 1,573. Nilai-nilai tersebut memberikan indikasi mengenai potensi multikolinieritas di antara variabel independen yang digunakan dalam analisis.

Nilai VIF yang didapatkan dari setiap variabel independen tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF tersebut lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang didapatkan tidak memiliki gejala multikolinieritas, artinya model regresi linier telah memenuhi persyaratan.

Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tidak tetap, maka model dinyatakan mengalami gejala heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini dilakukan uji scatterplot dengan alat bantu SPSS, untuk mengetahui apakah model mengalami gejala heteroskedastisitas atau tidak. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa pada scatterplot titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola teratur, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastitas dengan Metode Scatterplot

Hasil pengujian hipotesis

Uji F statistik

Uji F dipergunakan untuk melihat apakah secara simultan variabel pendapatan per-kapita (X1), Angka Partisipasi Sekolah (APS) (X2), kemiskinan (X3), DAK fisik pendidikan (X4), dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X5) berpengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan (Y). Hasil uji F statistik dengan bantuan program analisis statistik SPSS 21 (Tabel 3.), didapatkan nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) dari uji F (0,000) lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis alternatif keenam, yang berarti secara bersama-sama (simultan) pendapatan per-kapita (X1), Angka Partisipasi Sekolah (APS) (X2), kemiskinan (X3), DAK fisik pendidikan (X4), dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X5) berpengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y).

Tabel 3. Hasil pengujian F statistik

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,058	5	0,012	13,889	0,000^b
	Residual	0,013	15	0,001		
	Total	0,071	20			

Sumber: Data diolah, 2023

4.2 Uji t statistik

Hasil uji t statistik melalui program SPSS 21 (Tabel 4.) didapatkan nilai signifikansi (sig) untuk variabel pendapatan per-kapita (X1) sebesar 0,006. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) untuk variabel pendapatan per-kapita (0,006) lebih kecil dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis pertama bahwa variabel pendapatan per-kapita berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y). Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Baidowi dkk (2022), Sasana (2012), dan Suparyati (2014) yang membuktikan bahwa pendapatan per-kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pendidikan. Dengan demikian semakin tinggi pendapatan per-kapita masyarakat suatu daerah, maka semakin tinggi pula indeks pendidikan di daerah tersebut.

Tabel 4. Hasil pengujian t statistik

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,066	0,501		2,127	0,050
1 X1	0,323	0,100	0,394	3,235	0,006
X2	0,874	0,258	0,981	3,384	0,004
X3	-0,200	0,314	0,172	0,637	0,533
X4	0,770	0,232	0,430	3,311	0,005
X5	0,446	0,140	0,434	3,177	0,006

Sumber: Data diolah, 2023

Nilai signifikansi (sig) untuk variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) (X2) (Tabel 4.) adalah sebesar 0,004. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) untuk variabel APS (0,004) lebih kecil dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis kedua bahwa variabel Angka Partisipasi Sekolah (APS) berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y). Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Aprilia dan Cerya (2023), Novitasari dan Wenagama (2018), Dahlan (2018), serta Rosyadah (2021) yang membuktikan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) berpengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan. Dengan demikian semakin tinggi APS, maka semakin tinggi pula indeks pendidikan di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan APS merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia melalui program wajib belajar. Sebagai pelaksana pembangunan pemerintah tentunya menyadari pentingnya modal sumber daya manusia yang berkualitas sebagai dasar bagi pembangunan. Upaya peningkatan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti adanya kebijakan dengan harapan pembangunan pendidikan yang dilakukan dapat berpengaruh ke arah pembangunan ekonomi di masa mendatang (Mulyadi, 2003). Dengan demikian apabila terjadi peningkatan pada tingkat Angka Partisipasi Sekolah (APS) maka indeks pembangunan manusia (IPM) di bidang pendidikan pada suatu daerah akan mengalami peningkatan pula.

Nilai signifikansi (sig) untuk variabel kemiskinan (X3) (Tabel 4.) adalah sebesar 0,533. Hal ini berarti nilai signifikansi (sig) untuk variabel kemiskinan (0,533) lebih besar dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menolak hipotesis ketiga bahwa variabel kemiskinan berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y). Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Hidayati dan Imaningsih (2022), Karini (2018), serta Rahmatin dan Soejoto (2017) yang membuktikan

bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap pembanunan manusia di bidang pendidikan. Dengan demikian masih menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Nilai signifikansi (*sig*) untuk variabel DAK fisik pendidikan (X4) (Tabel 4.) adalah sebesar 0,005. Hal ini berarti nilai signifikansi (*sig*) untuk variabel DAK fisik pendidikan (0,005) lebih kecil dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis keempat bahwa variabel DAK fisik pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y). Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Maysaroh dan Arif (2022), Amir dkk (2019), dan Sembiring (2020) yang membuktikan bahwa DAK fisik pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan. Dengan demikian semakin tinggi DAK fisik pendidikan yang diterima pemerintah Provinsi Jambi, maka tentunya akan semakin meningkat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan khususnya di jenjang pendidikan SMA. Kondisi ini tentunya akan meningkatkan indeks pendidikan Provinsi Jambi, seiring dengan peningkatan jumlah DAK fisik pendidikan yang diterima. Nashshar dan Mulyana (2022) menyatakan bahwa dana alokasi khusus seperti DAK fisik pendidikan berkontribusi dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia, khususnya di bidang Pendidikan. Pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur Pendidikan yang memadai yang dibiayai oleh DAK fisik pendidikan dapat meningkatkan standar pelayanan minimal pendidikan serta akses pendidikan yang lebih luas khususnya bagi masyarakat usia sekolah di tingkat daerah kabupaten.

Nilai signifikansi (*sig*) untuk variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X5) (Tabel 4.) adalah sebesar 0,006. Hal ini berarti nilai signifikansi (*sig*) untuk variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (0,006) lebih kecil dari 0,05, dengan demikian didapatkan keputusan untuk menerima hipotesis kelima bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap variabel indeks pendidikan Provinsi Jambi (Y). Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Larassita (2015), Mongan (2019), Kahang dkk (2016), serta Wahyuni dan Amar (2023) yang membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah yang memadai di bidang pendidikan dapat membantu meningkatkan akses pendidikan. Dana tersebut dapat digunakan untuk membangun lebih banyak sekolah, khususnya di daerah terpencil, serta menyediakan transportasi atau bantuan keuangan kepada peserta didik yang kesulitan akses ke sekolah. Selain itu, pengeluaran pemerintah yang memadai juga dapat membantu mengurangi ketidakesetaraan pendidikan. Dengan menyediakan akses dan kualitas pendidikan yang setara bagi semua anak berusia sekolah, termasuk mereka yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah, pemerintah dapat membantu mengurangi kesenjangan pendidikan. Hal ini tentunya dapat meningkatkan indeks pendidikan di suatu daerah seiring dengan peningkatan akses pendidikan dan partisipasi anak dalam bersekolah.

Strategi peningkatan indeks pendidikan Provinsi Jambi

Berdasarkan analisis faktor strategis internal peningkatan indeks pendidikan Provinsi Jambi melalui pendekatan matriks *Internal Factor Environment* (IFE), didapatkan faktor kekuatan utama yang dimiliki pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan indeks pendidikan Provinsi Jambi, adalah adanya kesadaran kolektif aparaturnya terhadap pentingnya pendidikan bagi pembangunan sumber daya manusia. Hal ini didasari atas skor tertinggi yang diperoleh untuk faktor kekuatan ini, dengan perolehan skor sebesar 0,747 (Tabel 5.). Di sisi lain, kelemahan utama yang

dimiliki pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan indeks pendidikan, yaitu terletak pada faktor ketidaksesuaian data *real* sarana prasarana sekolah dengan data di DAPODIK (Data Pokok Pendidikan). Hal ini didasari atas skor tertinggi yang diperoleh untuk faktor kelemahan ini, dengan perolehan skor sebesar 0,466 (Tabel 5.).

Tabel 5. Matriks IFE SWOT strategi peningkatan indeks pendidikan Provinsi Jambi

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
I. Kekuatan (<i>Strengths</i>)			
1. Adanya kesadaran kolektif aparaturn kewilayahan terhadap pentingnya pendidikan bagi pembangunan sumber daya manusia	0,209	3,575	0,747
2. Unit kerja yang menangani urusan pendidikan (dinas pendidikan) melakukan koordinasi dengan unit kerja lain yang mendukung pembangunan di bidang pendidikan	0,203	3,325	0,675
3. Kesesuaian RPJMD dan RKPD dengan RPJMN bidang Pendidikan	0,205	3,450	0,707
4. Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat	0,185	3,150	0,583
5. Koordinasi yang baik antara tim perencana dan pelaksana anggaran DAK fisik pendidikan	0,197	3,225	0,635
Total	1,000		3,347
II. Kelemahan (<i>Weakneses</i>)			
1. Masih adanya sekolah yang belum memiliki sertifikat lahan sehingga menghambat dalam proses pemberian DAK fisik pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	0,244	1,450	0,354
2. Ketidaksesuaian antara kebutuhan sekolah dengan menu DAK yang diterima	0,248	1,600	0,397
3. Ketidaksesuaian data <i>real</i> sarana prasarana sekolah dengan data di DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)	0,270	1,725	0,466
4. Masih lemahnya pengawasan internal dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana yang bersumber dari DAK fisik pendidikan	0,237	1,525	0,361
Total	1,00		1,578

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil analisis faktor strategis eksternal peningkatan indeks pendidikan Provinsi Jambi melalui pendekatan matriks *External Factor Environment* (EFE), didapatkan faktor peluang utama yang paling berpengaruh bagi upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan indeks pendidikan yaitu peningkatan kapasitas operator dapodik dalam verifikasi data sarana dan prasarana sekolah. Hal ini didasari atas skor tertinggi yang diperoleh untuk faktor peluang ini, dengan perolehan skor sebesar 0,804 (Tabel 6.). Di sisi lain, potensi kecurangan dalam pelaksanaan anggaran DAK fisik bidang pendidikan, merupakan faktor ancaman utama bagi upaya Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan indeks pendidikan. Hal ini didasari atas skor tertinggi yang diperoleh untuk faktor ancaman ini, dengan perolehan skor sebesar 0,362 (Tabel 6.).

Merujuk pada total skor yang didapatkan dari matriks IFE dan EFE, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan kedua kondisi internal dan eksternal tersebut ke dalam Matriks Internal Eksternal agar dapat mengetahui langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan indeks pendidikan. Pada tahap ini didapatkan bahwa nilai x (0,885) dan nilai y (0,936) bernilai positif, dimana

menurut Rangkuti (2016) jika nilai x dan y keduanya bernilai positif, maka organisasi atau perusahaan berada pada kuadran I, sehingga mendukung untuk menerapkan strategi Kekuatan-Peluang (SO), dimana kondisi ini sangat menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi Jambi yaitu dengan memaksimalkan peluang dan kekuatan yang ada untuk meningkatkan indeks pendidikan.

Tabel 6. Matriks EFE SWOT Strategi Peningkatan Indeks Pendidikan Provinsi Jambi

Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
III. Peluang (<i>Opportunities</i>)			
1. Penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah	0,189	3,250	0,614
2. Dukungan stakeholder (swasta) dalam pembangunan bidang pendidikan	0,200	3,425	0,686
3. Peningkatan kapasitas operator dapodik dalam verifikasi data sarana dan prasarana sekolah	0,226	3,550	0,804
4. Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap partisipasi pendidikan bagi anak usia sekolah	0,193	3,375	0,650
5. Semakin tingginya perhatian stakeholder pendidikan di Provinsi Jambi, termasuk adanya dukungan politis dari legislatif terhadap upaya pembangunan pendidikan	0,191	3,300	0,632
Total	1,000		3,386
IV. Ancaman (<i>Threats</i>)			
1. Kurangnya pemeliharaan dan perawatan fasilitas fisik pendidikan yang dibangun dari DAK fisik pendidikan	0,207	1,550	0,320
2. Ketidaksiesuaian anggaran DAK fisik Pendidikan yang dialokasikan untuk daerah 3T karena harga satuan bahan bangunan tidak dibedakan dengan daerah perkotaan	0,192	1,475	0,283
3. Potensi kecurangan dalam pelaksanaan anggaran DAK fisik bidang pendidikan	0,216	1,675	0,362
4. Tingkat inflasi yang dapat meningkatkan harga bahan baku bangunan	0,186	1,350	0,251
5. Kesalahan operator dapodik (<i>human error</i>) dalam verifikasi data sarana dan prasarana sekolah	0,199	1,500	0,299
Total	1,000		1,515

Sumber: Data diolah, 2023

Upaya-upaya yang dapat dilakukan berdasarkan strategi menurut kuadran I (SO), mencakup; (1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat di wilayah pedesaan, (2) pemerataan jumlah guru dan tenaga kependidikan di Kota dan Kabupaten di Provinsi Jambi, (3) peningkatan efektivitas pengendalian dan audit terhadap sarana dan prasarana di sekolah, (4) meningkatkan efektivitas proses pembelajaran di sekolah melalui pengadaan sarana dan prasarana yang disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kependidikan, (5) melakukan kerjasama dalam bidang sosial dengan masyarakat sekitar, guna mengupayakan lokasi sekolah yang nyaman, sehingga terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, dan (6) memanfaatkan semaksimal mungkin sarana belajar dan fasilitas penunjang yang ada dalam kegiatan belajar mengajar guna meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik guna menghasilkan output lulusan yang bermutu, sehingga dapat terciptanya jalinan

kemitraan sekolah dengan lembaga lain yang relevan dalam pemanfaatan output lulusannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendapatan per-kapita, Angka Partisipasi Sekolah (APS), kemiskinan, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan indeks pendidikan Provinsi Jambi selama kurun waktu 2002-2022, menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi. Rata-rata perkembangan pendapatan per-kapita Provinsi Jambi adalah sebesar 12,42 persen per-tahun. Rata-rata perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah sebesar 1,05 persen per-tahun. Rata-rata perkembangan kemiskinan di Provinsi Jambi adalah sebesar 7,16 persen per-tahun. Rata-rata perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan yang diterima Provinsi Jambi adalah sebesar 19,94 persen per-tahun. Rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi bidang pendidikan adalah sebesar 24,26 persen per-tahun. Rata-rata perkembangan indeks pendidikan Provinsi Jambi adalah sebesar 2,09 persen per-tahun.

Merujuk pada hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa secara parsial pendapatan per-kapita, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan Provinsi Jambi, sedangkan kemiskinan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks pendidikan Provinsi Jambi. Sementara secara simultan pendapatan per-kapita, Angka Partisipasi Sekolah (APS), kemiskinan, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap indeks pendidikan Provinsi Jambi.

Merujuk pada hasil analisis faktor strategis internal dan hasil analisis faktor strategis eksternal didapatkan bahwa model strategi yang paling tepat untuk diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan indeks pendidikan yaitu strategi Kekuatan-Peluang (SO), dimana strategi ini sangat menguntungkan bagi Pemerintah Provinsi Jambi yaitu dengan memaksimalkan peluang dan kekuatan yang ada untuk meningkatkan indeks pendidikan.

Saran

Merujuk pada faktor yang menjadi kelemahan utama yang dimiliki pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan indeks pendidikan, yaitu ketidaksesuaian data *real* sarana prasarana sekolah dengan data di DAPODIK (Data Pokok Pendidikan), maka diperlukan peningkatan kapasitas operator dapodik dalam verifikasi data sarana dan prasarana sekolah melalui pendidikan dan pelatihan, serta koordinasi yang lebih baik antara Dinas Pendidikan dan semua Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam pelaporan dan pengajuan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.

Merujuk pada faktor yang menjadi ancaman utama yang dihadapi pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya meningkatkan indeks pendidikan, yaitu potensi kecurangan dalam pelaksanaan anggaran DAK fisik bidang pendidikan, maka diperlukan adanya pengawasan yang ketat dari seluruh stakeholder yang terlibat, agar dana yang digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan standar kualitas sarana dan prasarana sekolah yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, I., Zamhuri, M.Y., dan Fattah, S. (2019). Analisis Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. *JBMI: Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika*, Vol. 15 (3): 276-290
- Aprilia, O. dan Cerya, E. (2023). Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Salingka Nagari*, Vol. 02 (1): 367-380
- Aviliani, dkk. (2014). Addressing the Middle Income Trap: Experience of Indonesia. *Asian Social Science*, Vol. 10 (10)
- Aziz, G.A., Rochaida, E., dan Warsilan. (2016). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen*, Vol. 12 (1): 29-48
- Baidowi, U.M., Utami, N., Prasetyo, E.N., dan Jabar, J. (2022). Pengaruh Pendapatan per-kapita dan Kemiskinan Terhadap IPM di Jawa Timur. *At-Tuijar*, Vol. 10 (2): 186-195
- Berlian, N. (2011). Faktor-Faktor yang Terkait dengan Rendahnya Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 17 (1): 43-55
- Dahlan, A.M. (2018). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah*. Artikel Penelitian. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
- Hidayati, D.R. dan Imaningsih, N. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 24 (4): 703-710
- Kahang, M., Saleh, M., dan Suharto, R.B. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indkes Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 18 (2): 130-140
- Kaharuddin. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 24 (1): 35-44
- Karini, P. (2018). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Usia 16—18 Tahun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, Vol. 10 (1): 103-115
- Larasati Prayoga, M., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2021). Faktor Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. *Jambura Economic Education Journal*, Vol. 3 (2): 135–143
- Larassita, Y.F., Istiyani, N., dan Jumiati, A. (2015). *Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember Periode 1990-2014*. Artikel Penelitian. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember
- Lubis, R. Fahrozi. (2014). *Analisis Variabel Penentu Pendapatan Perkapita Sebagai Upaya Pencegahan Growth Slowdown (Studi di China, Filipina, India, Indonesia, Malaysia, dan Thailand)*. Artikel Penelitian. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Malale, A. dan M. A. Sutikno. (2014). Analisis Middle-Income Trap di Indonesia. *Jurnal BPPK*, Vol. 7 (2): 91-110
- Maysaroh, R. dan Arif, M. (2022). Analisis Peran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan

- Ekonomi Provinsi Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 (3): 322-335
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, Vol. 4 (2): 163-176
- Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Putong
- Nashshar, M., I., & Mulyana, B. (2022). Pengaruh dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, Vol. 7 (3): 255-270
- Novitasari, N.M.A.W. dan Wenagama, I.W. (2018). Pengaruh Angka Kematian Bayi, Angka Partisipasi Sekolah, dan Rasio Ketergantungan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 11 (8): 3271-3299
- Priseptian, L. dan Primandhana, W.P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. *Forum Ekonomi*, Vol. 24 (1): 45-53
- Rahmatin, U.Z. dan Soejoto, A. (2017). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen dan Keuangan*, Vol. 1 (2): 127-140
- Rosyadah, J.A. (2021). Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, Vol. 4 (1): 1080-1092
- Sasana, H. (2012). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan per-kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 25 (1)
- Sembiring, T.A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Terhadap Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 – 2018). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 (1): 77-92
- S Sunargo, D Hastuti. (2019). Mengatasi perilaku kerja kontraproduktif melalui peran integratif politik organisasional dan kecerdasan emosional pada era revolusi industri 4.0. *Jurnal Paradigma Ekonomika* 14 (2), 45-54
- Suparyati, A. (2014). Pengaruh Economic Freedom dan Pendapatan Per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Media Ekonomi*, Vol. 22 (2): 171-182
- Virdam, F. dan Ariani, M.B.N. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Sekolah pada Provinsi di Pulau Sulawesi. *Jurnal of Development Economic and Digitalization*, Vol. 2 (1): 20-35
- Wahyuni, A. dan Amar, S. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat. *JKEP: Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 5 (1): 29-36